



TRANSFORMASI EKONOMI DAN RESPONS KEBIJAKAN TAHUN 2025

Ariesy Tri Mauleny*

Abstrak

Report Ipsos Predictions 2025 mencatatkan tingkat optimisme Indonesia tertinggi di dunia, dengan 90% responden percaya. Angka ini lebih baik dari tahun 2024 dan melampaui rata-rata global. Optimisme tersebut harus dimanfaatkan di tengah tingginya ketidakpastian global dan transisi kebijakan pemerintahan baru. Tulisan ini menganalisis langkah strategis dan respons kebijakan dalam memperkuat stabilitas ekonomi. Meningkatkan pajak dan mengurangi belanja, bukan pilihan di tengah tuntutan realisasi janji politik awal pemerintahan. Sinergi transformasi ekonomi sangat dibutuhkan di tengah sempitnya ruang fiskal. Mesin-mesin ekonomi baru perlu ditumbuhkan untuk mendorong perekonomian. Investasi, ekspor, dan digitalisasi masih menjadi kunci transformasi ekonomi. Dukungan penguatan transformasi tata kelola dan transformasi sosial, tetap dibutuhkan. Termasuk kesadaran sinergi antar kementerian koordinator yang baru terbentuk, termasuk antarkementerian/lembaga di bawahnya dan pemerintahan daerah, harus segera dijalankan. DPR RI melalui Komisi XI, juga perlu memastikan apakah respons kebijakan yang dijalankan pemerintah sudah tepat, dalam menjaga stabilitas dan percepatan transformasi ekonomi ke depan.

Pendahuluan

Pemerintah optimis terhadap perekonomian Indonesia ke depan. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) pada peresmian Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2025. Menkeu juga menyoroti capaian APBN 2024, yang terbilang berhasil mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah berbagai tantangan. Sinergi, semangat, dan tekad bersama, akan mendorong ekonomi Indonesia tumbuh lebih kuat di tahun 2025 (kemenkeu.go.id, 2025). Optimisme tersebut sejalan dengan *Report Ipsos Predictions 2025* yang mencatatkan tingkat optimisme Indonesia tertinggi di dunia, dimana 90% responden percaya. Angka ini lebih baik dari tahun sebelumnya.

Optimisme perlu mempertimbangkan kondisi ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi global yang masih menjadi tantangan di tahun 2025. Bahkan dikhawatirkan akan berdampak terhadap sektor ekonomi strategis Indonesia, jika tidak segera dimitigasi. Sejumlah tantangan domestik seperti keterbatasan ruang fiskal, inflasi, kesenjangan, kemiskinan, dan pengangguran, juga masih harus diselesaikan.

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keperlemenan Badan Keahlian DPR RI.
Email: ariesy.mauleny@dpr.go.id

Besarnya tantangan berpotensi menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat. Respons kebijakan seharusnya meredam permasalahan, bukan memunculkan kekhawatiran baru dan kesimpangsiuran, seperti isu kenaikan pajak dan stagnasi pendapatan. Kabar baik muncul setelah Presiden Prabowo mengumumkan bahwa PPN 12% diberlakukan untuk barang dan jasa mewah (Dimas, 2025). Pembatalan tersebut menunjukkan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi masyarakat. Pernyataan Presiden dapat meredam ketidakpastian yang menjadi musuh perekonomian. Berdasarkan isu tersebut, tulisan ini menganalisis bagaimana langkah strategis dan respons kebijakan perlu dilakukan, bukan hanya untuk menjaga optimisme dan memperkuat stabilitas ekonomi pada awal pemerintahan, tetapi juga untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Optimisme 2025: Pemerintahan Baru, Harapan Baru?

Report Ipsos Predictions 2025 mengetengahkan *insight* dari 33 negara termasuk Indonesia, dengan 23.000 responden. Hasil survei menunjukkan: 79% responden percaya harga akan naik lebih cepat dari pendapatan; 74% responden berharap kenaikan pajak yang signifikan; dan 71% responden optimis bahwa tahun 2025 akan lebih baik. Menariknya, Indonesia mencatatkan tingkat optimisme tertinggi di dunia (90%). Bahkan 82% responden percaya bahwa perbaikan dan peningkatan ekonomi akan terjadi di tahun 2025 (Ipsos, 2024).

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Setidaknya terdapat enam janji politik yang disampaikan saat kampanye, yaitu: 1) meningkatkan produktivitas pertanian; 2) kartu kesejahteraan; 3) pembangunan desa dan pemberian BLT; 4) mendirikan Badan Penerimaan Negara; 5) memberi makan gratis kepada 82,9 juta rakyat miskin; dan 6) menaikkan gaji aparat negara (Tim CNN Indonesia, 2025). Sementara program di bidang ekonomi yang disampaikan dalam Debat Presiden meliputi *tax ratio*, pengangguran dan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan makan siang gratis (Taufani MRI, 2024).

Pemenuhan janji politik menjadi tantangan berat Presiden Prabowo pada awal periode pemerintahannya. Kecepatan mengambil keputusan terlihat dari upaya Presiden mengimplementasikan janji melalui penandatanganan perubahan nomenklatur di Kabinet Merah Putih yang mengakomodir seluruh pemangku kepentingan di negeri ini. Dilanjutkan dengan merealisasikan segera Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan hampir serentak di seluruh wilayah Indonesia, pada 6 Januari 2025. Masyarakat masih terus menantikan janji-janji selanjutnya direalisasikan. Kenaikan gaji guru, penyediaan tiga juta perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, hingga ketahanan pangan, bukanlah janji yang mudah direalisasikan di tengah keterbatasan ruang fiskal dan ketidakpastian global.

Membaca kondisi tersebut, ‘kericuhan’ yang mengiringi rencana kenaikan PPN menjadi 12% di awal pemerintahan menjadi tidak terelakkan. Respons kebijakan yang relatif mudah realisasinya, namun lebih ‘kedap suara’, dinilai paling realistis saat ini. Penetapan kemenkeu sepenuhnya berada di bawah Presiden, PPN 11/12%, hingga rencana mengembalikan anggaran/aset negara hasil korupsi dapat menjadi respons kebijakan untuk mempercepat realisasi janji di tengah ketidakpastian dan upaya menjaga stabilitas ekonomi ke depan.

Strategi Menjaga Optimisme dan Stabilitas Ekonomi

World Bank, IMF, dan ADB memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 berada pada kisaran 5,0-5,1%, lebih rendah dari target dalam RAPBN 2025. Hal ini cukup beralasan mengingat ketidakpastian global akibat perang dan ketegangan geopolitik, serta gejolak pasar keuangan dunia masih menjadi faktor utama perlambatan ekonomi global. Perlambatan ekonomi China dan penurunan harga komoditas andalan Indonesia turut memengaruhi kinerja ekonomi nasional. Penetapan tarif dan pendekatan ekonomi nasionalistik Donald Trump pascakemenangannya dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat, juga berpotensi memperburuk tekanan ekonomi global (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu menyatakan bahwa kembalinya kinerja manufaktur ke zona ekspansif, akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. *Purchasing Managers Index* (PMI) Indonesia mencapai 51,2 pada Desember 2024 atau tertinggi sejak Mei 2024. Sementara negara Asean lainnya seperti Vietnam dan Malaysia mengalami kontraksi (Rizal, 2025). Perbaikan manufaktur ini didorong oleh kenaikan produksi dan permintaan di pasar domestik dan internasional yang meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru.

Harapannya, kondisi ini akan terus berlanjut sampai Lebaran nanti. Untuk itu, pemerintah perlu merancang situasi dengan memunculkan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang lebih baik dan inflasi terkendali di sepanjang tahun 2025. Dengan demikian, upaya merealisasikan janji politik dapat tetap bersinergi dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi sehingga target makro ekonomi Indonesia tetap dapat diwujudkan (Tabel 1).

Tabel 1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro (2024-2025)

Indikator Ekonomi Makro	2024		2025	
	APBN	Outlook	Pembicaraan Pendahuluan	RAPBN
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,1	5,1-5,5	5,2
Inflasi (% _{yoy})	2,8	2,7	1,5-3,5	2,5
Suku Bunga SBN 10 Tahun (% _{rata-rata})	6,7	6,9	6,9-7,2	7,1
Nilai Tukar (Rp/US\$, rata-rata)	15.000	16.000	15.300-15.900	16.100
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (US\$/barell, rata-rata)	82	82	75-85	82
Lifting Minyak (rbph)	635	592	580-605	600
Lifting Gas (rbsmph)	1.033	990	1.003-1.047	1.005

Sumber: Diolah, 2025.

Mesin Ekonomi Baru

Optimisme konsumen dan pelaku usaha merupakan modal penting bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi ke depan. Pemerintah perlu merencanakan strategi, melakukan evaluasi, dan mitigasi, seperti: menjaga indeks penjualan ritel dan indeks keyakinan konsumen berada pada batas aman, termasuk menjaga aktivitas produksi yang ekspansif; menjaga mesin-mesin ekonomi yang ada sejalan dengan visi pemerintahan ke depan, dan mendapat simpati Masyarakat; serta menyinergikan janji politik, program strategis, dan membangun mesin ekonomi baru, di tengah keterbatasan fiskal dan ketidakpastian global. Hal ini akan menjadi batu ujian pertama dalam kepemimpinan pemerintahan baru ini.

Sebagai contoh, pemerintah harus berani melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan MBG serta menilai sejauh mana program tersebut efektif mencapai sasaran dan sesuai *impact* yang diharapkan. Pemerintah juga harus berupaya menyinergikan program MBG dengan program strategis lainnya, seperti penguatan UMKM, ketahanan pangan dan lain sebagainya.

Rizal (2025) memandang investasi, ekspor, dan digitalisasi adalah tiga mesin utama untuk mempercepat target pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi sektor manufaktur yang bernilai tambah tinggi, harus diprioritaskan melalui insentif yang jelas dan regulasi yang stabil. Selain itu pemerintah juga harus mendorong percepatan transisi energi hijau untuk menarik investasi global. Ekspor juga perlu diarahkan untuk diversifikasi produk dan pasar, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah. Selain itu, digitalisasi ekonomi, UMKM berbasis teknologi, serta infrastruktur digital harus difasilitasi untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan efisiensi sektor tradisional.

Apapun mesin ekonomi baru yang dirancang, sinergi transformasi ekonomi dibutuhkan, di tengah sempitnya ruang fiskal. Dukungan penguatan transformasi tata kelola dan transformasi sosial, juga menjadi poin kunci. Termasuk kesadaran sinergi antar kementerian koordinator yang baru terbentuk, maupun antar kementerian/lembaga di bawahnya, serta pemerintahan daerah. DPR RI melalui Komisi XI, juga perlu memastikan apakah respons kebijakan yang dijalankan pemerintah sudah tepat, dalam menjaga stabilitas ekonomi dan percepatan transformasi ekonomi.

Penutup

Setelah melewati berbagai dinamika di sepanjang tahun 2024, halang rintang ekonomi Indonesia pada tahun 2025 dinilai masih sangat menantang. Report Ipsos Predictions 2025 mencatatkan tingkat optimisme Indonesia tertinggi di dunia (90%), melampaui rata-rata globalnya (71%). Namun, optimisme tersebut perlu mencermati tantangan global dan ketidakpastian yang masih membayangi.

Sinergi dalam melakukan transformasi ekonomi sangat dibutuhkan mengingat sempitnya ruang fiskal pemerintah. Mesin-mesin ekonomi baru perlu ditumbuhkan untuk mendongkrak perekonomian. Investasi, ekspor, dan digitalisasi masih menjadi kunci transformasi ekonomi. Dukungan penguatan transformasi tata kelola dan transformasi sosial, tetap dibutuhkan. Termasuk kesadaran sinergi antar kementerian koordinator yang baru terbentuk, maupun antar kementerian/lembaga di bawahnya, serta pemerintahan daerah. DPR RI melalui Komisi XI, juga perlu memastikan apakah respons kebijakan yang dijalankan pemerintah sudah tepat, dalam menjaga stabilitas dan percepatan transformasi ekonomi nasional.

Referensi

- Ipsos. (2024). *Prediction 2025 Report*.
<https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2025-01/ipsos-predictions-2025-survey-report.pdf>
- Kementerian Keuangan. (2025, Januari 2). APBN kuat, ekonomi tangguh. *Berita Utama*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/menkeu-pembukaan-perdagangan-bei-2025>
- Dimas. (2025, Januari 2). Batal, kenaikan tarif PPN 12 persen secara umum. *Kompas*, p. 9.
- Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2025, Januari 3). Menakar pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025. <https://www.ums.ac.id/berita/teropong-jagat/menakar-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2025>
- Rizal (2025, Januari 8). Ekonom: fokus pada tiga “mesin” untuk capai target pertumbuhan ekonomi. *Antara News*.
<https://www.antaraneews.com/berita/4571494/ekonom-fokus-pada-tiga-mesin-untuk-capai-target-pertumbuhan-ekonomi>